

PERAN PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI DESA BONDAWUNA KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Erwin Hujani ^{*)1)}, Irwan Bempah ²⁾, Yanti Saleh ²⁾

¹⁾ Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

²⁾ Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

ABSTRACT

This research is intended to explore the role of agriculture extension in the implementation of the social forestry program in Bondawuna Village, Suwawa Selatan Sub-district, Bone Bolango Regency. Purposive sampling method was used to select a total of 4 samples. Employing a descriptive analysis, the study shows that the respondents, based on the average age, are 95.8% productive, and the remaining 4.1% is the opposite. In addition, the educational background of the respondents is varied; they are elementary school graduates (83.3%), senior high school graduates (12.5%), and the others have a bachelor degree (4.1%) half of the total respondents (50%) are native inhabitants, while the others are transmigrants (45.8% and 4.1%). The respondents are mostly farmers (87.5%), and only a few of them are civil servants (12.5%). Regarding the impact of the extension program, it is revealed that the implementation of the social forestry program is in the good category with percentage of 74.16%. All in all, the social forestry program in Bondawuna Village is well-implemented and in accordance with the regulation by the Department of Social Forestry.

Keywords: Role, Extension of Program Implementation, Social Forestry

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling* dengan 4 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur rata-rata usia responden termasuk dalam kategori produktif 95.8% yang tidak produktif 4.1%. Sedangkan dari tingkat pendidikan responden masih tergolong tamat SD 83.3%, SLTA 12.5% dan Strata 1 4.1%. Responden berdasarkan lama tetap masih tergolong dalam masyarakat asli 50% transmigrasi 45.8% dan 4.1%. dan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan rata-rata responden berprofesi sebagai petani 87.5% sedangkan rendah aparat 12.5%. kategori selanjutnya yaitu peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial dimana total hasil persentasenya sebesar 74.16% dengan memiliki kategori baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial di Desa Bondawuna sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Perhutanan Sosial.

Kata Kunci: Peran, Penyuluhan Pelaksanaan Program, Perhutanan Sosial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia sebesar 129 juta ha. Dengan luas Indonesia yang sebesar 191.093 ribu ha menunjukkan bahwa luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia sangat luas atau mencapai 67,73 persen dari luas seluruhnya. Adapun luas hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya hampir sama besar, yaitu sekitar 21-23 persen. Namun, luas hutan produksi yang dapat dikonservasi hanya sebesar 12 persen dari total luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia. Kawasan hutan terluas di Indonesia adalah hutan lindung yaitu sebesar 29.918 ribu ha. Luasnya hutan lindung Indonesia sangat berperan penting

untuk menjaga ekosistem di dunia, tidak hanya bagi ekosistem di Indonesia sendiri (Badan Pusat Statistik, 2013:8).

Hutan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberlanjutan lingkungan fungsi hutan yaitu dibagi menjadi produksi, lindung, konservasi dan lain - lain. Berdasarkan strategi pembangunan jangka panjang kehutanan, hutan yang sudah tidak produktif akan dioptimalkan fungsinya kembali, oleh pemerintah hutan dimanfaatkan sebagai hutan tanaman (Anjasari, 2009 dalam jurnal Syahryzal, 2015:1).

Degradasi hutan yang terjadi serta banyaknya lahan kritis memberikan berbagai macam efekburuk, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutandan lahan untuk menekan degradasi hutan dan memperbaiki lahan kritis

*Alamat Email:

erwinhujani96@gmail.com

tersebut (Brown, 1994 dalam jurnal Aris Jatmiko, Ronggo Sadono, Ries Rahayu Wijayanti Faida, 2012:31)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam peraturan perundangan lainnya telah mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan harus lebih menitik beratkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal sejak lama di dalam dan di sekitar hutan mempunyai hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan serta sumberdaya yang ada di dalamnya, termasuk aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi dan bahkan aspek religius.

Proses penyuluhan kehutanan diharapkan dapat merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara memfasilitasi proses dalam merefleksikan permasalahan masyarakat, potensi dan lingkungan serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara proporsional. Karena itu pula diharapkan penyuluh kehutanan bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan, akan tetapi penyuluh kehutanan harus terus menerus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha/kegiatan berbasis masyarakat. (Iskandar, Hasan Almutahar, M. Sabran, 2013)

Kabupaten Bone Bolango memiliki luas kawasan hutan yaitu sebesar 188.174,91 Ha. Dengan berbagai fungsinya, hutan produksi terbatas sebesar 18.803,29 Ha, hutan produksi tetap sebesar 836,45 Ha, hutan produksi yang dapat di konservasi 0'00, hutan lidung sebesar 15.718,25 Ha, suaka alam dan pelestarian alam sebesar 104.904,72, dan area pengguna lain sebesar 47.912,20 Ha. (Badan pusat statistik 2015). Kawasan hutan Bone Bolango yang masuk dalam usulan program nasional perhutanan sosial tersebut, terdiri dari program hutan desa seluas 160 hektar di Desa Oluhuta kecamatan Kabila Bone. Kemudian program hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 200 hektar di Desa Bulontala timur dan 150 hektar Dusun Gintapi Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan program perhutanan sosial dan bagaimana peran penyuluhan terhadap keberlanjutan program perhutanan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Pembangunan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HKM, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan Hutan.

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pemohon yang dapat mengajukan hak pengelolaan HD adalah satu atau beberapa lembaga desa yang dapat berbentuk: koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jika disetujui permohonannya akan terbit hak pengelolaan hutan desa (HPHD) sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengelola hutan tersebut. Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi hutan desa adalah hutan produksi dan hutan lindung.

Hutan Kemasyarakatan (HKM) adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pihak yang dapat menjadi pemohon untuk HKM ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi. Pemohon yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek HKM adalah hutan produksi dan hutan lindung.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pihak yang dapat memohonkan HTR ini adalah perorangan (petani hutan), kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi petani hutan, maupun perorangan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pemohon yang dikabulkan permohonannya akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman rakyat (IUP HHK-HTR). Kemitraan Kehutanan (KK) adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kemitraan atau kerja sama ini dapat dilakukan

di semua jenis hutan, baik itu hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi.

Hutan Adat (HA) dalam perhutanan sosial, pengertian hutan adat agak berbeda dengan 4 (empat) skema perhutanan sosial lainnya (HD, HTR, HKm, dan KK) karena hutan adat ini bukan berada di dalam kawasan hutan negara tapi berada di dalam hutan hak. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya pengelolaan hutan secara penuh ada di tangan masyarakat hukum adat. Hingga saat ini telah ada 18 hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Hutan adat dapat berupa kawasan hutan dengan fungsi apapun, baik itu produksi, lindung, maupun konservasi.

Program Perhutanan Sosial

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai palaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HKM, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan Hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan Hutan negara dengan system pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Menurut hasil penelitian Rahmat dkk, (2005) dalam Dian Kagungan (2008:23) dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Hkm, pihak kehutanan Provinsi Lampung menetapkan pencadangan areal Hkm seluas 23.239,15 ha. Dengan di implementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi. Namun sejauh ini perkembangan HKm di Provinsi Lampung dinilai banyak kalangan belum dapat mengakomodir permasalahan permasalahan pengelolaan hutan yang diharapkan. Hkm diharapkan pula dapat mengakomodasi dua kepentingan yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu kepentingan pelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Rahmat, 2002) dalam Dian Kagungan (2008:23).

Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial (PS). Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan menteri sebelumnya yang mengatur masing-masing skema perhutanan sosial secara terpisah. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Produksi/Ekonomi, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan;
- b. Aspek Ekologis, yaitu terwujudnya pemanfaatan hutan yang tidak merusak dan mengganggu ekosistem dan lingkungan.
- c. Aspek Sosial, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat pemegang ijin/hak kelola menuju pada kesadaran kelestarian fungsi hutan serta pemanfaatan hutan yang berkontribusi kepada pembangunan.

Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial

Peran penyuluhan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitasi proses belajar, sumber informasi, pendampingan, pemecah masalah, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan petani untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Mardikanto, 2009 dalam Karim S. Dkk, 2013:5). Muljono (2011:1) dalam Iskandar 2013:4 mengemukakan, penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasidalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara dan upaya mensejahterakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Badawuna kecamatan Suwawa Selatan, kabupaten Bone Bolango selama kurang lebih 1 bulan. Bone Bolango menjadi lokasi yang dipilih karena kawasan hutan Bone Bolango yang masuk dalam usulan program nasional perhutanan sosial tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan juga melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga

terkait sesuai dan berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109). Apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan apabila jumlah responden lebih dari seratus maka pengambilan sampel 10%-15% atau 25% atau lebih (Arikunto, 2002: 112).

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Lebih mudah dalam penebaran angket karena sudah ditentukan jumlah pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 30% dari populasi yang ada, karena jumlah populasi kurang dari 100 yaitu 80 populasi. $80 \times 30\% / 100 = 24$, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 24 populasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini akan memberikan susatu penjelasan atau gambaran mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kajian data-data pada penelitian.

Rumus yang digunakan adalah :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

- P = presentase
- f = Frekuensi Jawaban Responden
- n = Jumlah Responden

100% = Bilangan Tetap

Skor presentase yang diperoleh tiap indikator peran penyuluhan di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Klasifikasi yang dikemukakan (Subagio, 2009) dapat dilihat tabel 1.

Tabel 1.
Klasifikasi Skor Presentase.

No	Klasifikasi	Skor
1	Sangat setuju	4
2	Setuju	3
3	Kurang setuju	2
4	Tidak setuju	1

Sumber : Subagio, 2009

Kemudian skor jawaban yang diperoleh tiap indikator diklasifikasi dalam bentuk total

persentase jawaban. Sebagaimana dikemukakan Subagio (dalam Depdiknas, 2008:107) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Klasifikasi Skor Persentase.

No	Skor Persentase	Klasifikasi
1	76 - 100 %	Sangat Baik
2	51 - 75 %	Baik
3	26 - 50 %	Cukup
4	0 - 24%	Kurang Baik

Sumber : Depdiknas, 2008

HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Perhutanan Sosial dan Pelaksanaannya

Perhutanan sosial adalah suatu sisem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HKM, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan Hutan.

Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu desa yang termasuk dalam usulan program perhutanan sosial yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Dalam hal ini program perhutanan sosial telah menerapkan lima skema program yaitu, HD, HKM, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. namun di Desa Bondawuna Sendiri hanya diterapkan program hutan kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan system pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan sudah diadakan sosialisasi, dimana lembaga penyuluhan melakukan pengenalan program perhutanan sosial kepada masyarakat terlebih dahulu jika seandainya masyarakat dan pihak desa menerima program perhutanan sosial yang

disosialisasikan oleh lembaga penyuluhan maka penyuluh melakukan fasilitasi usulan berupa pendampingan. Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan merupakan salah satu desa yang masuk dalam usulan program perhutanan sosial dan sudah memiliki SK izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) yang diberikan kepada kelompok tani yang jumlahnya kurang lebih 74 orang. dalam pendampingan kelompok tani dalam pengusulan proposal izin hingga sampai keluranya SK izin, didalam pengusulan proposal yang paling umum adalah letak luas lokasi atau gambar desa serta administrasi, geografis, demografi yang akan diberikan permohonan izin. dalam permohonan izin maka penyuluh mendampingi pemohon izin hingga sampai kepada menteri kehutanan, setelah permohonan izin selesai kemudian akan di verifikasi teknis yaitu mengecek kembali usulan program tersebut dari letak gambaran lokasi hingga nama-nama kelompok pemohon program perhutanan sosial apakah sudah pernah masuk atau tidak. Setelah itu maka hasil verifikasi yang akan menentukan hasilnya apakah KTH di Desa Bondawuna akan mendapatkan SK izin. Sementara itu jenis kegiatan yang dilakukan oleh program perhutana sosial berupa bantuan bibit kayu-kayuan kepada masyarakat yang sudah memiliki izin perhutanan sosial, bantuan sarana prasarana dalam rangka pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti aren, pembangunan rumah produksi untuk gula semut, pembanguana rumah tunggku untuk pengolahan gula aren. Jadi ini merupakan kegiatan program perhutanan sosial yang nantinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkolaborasi dengan Perhutanan Sosial yang berada di Makassar yang merupakan UPT Kementrian Kehutanan dengan tujuan untuk membicarakan program-program yang nantinya setelah pasca izin apalagi yang akan dilaksanakan, sumber pendanaannya, model pengolahan kegiatan dilapangan seperti apa. Apakah melibatkan semua ten holder atau pemangku kepentingan saja.

Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial

Peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial merupakan hal yang sangat penting, salah satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan. peran penyuluhan dalam program perhutanan sosial merupakan suatu tujuan pembanguana demi untuk mengsucceskan program serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan memfasilitasi dan pendampingan serta motivasi kepada masyarakat.

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial Ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonominya, pendidikan serta pendapatan. Seperti menurut Abdulsyani (1994) dalam Maftukhah (2007) dalam Reddy Z. (2013:12) kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki, dalam hal ini sebagaimana yang temukan di Desa Bondawuna bahwa kondisi sosial ekonominya masih mayoritas dibawah rata-rata. Dilihat dari segi pendidikannya penduduknya banyak yang tamatan sekolah dasar sehingga, kemudian dilihat dari sudut pandang pendapatannya masyarakat tersebut masih mengalami kekurangan dalam perekonomian maka dari itu pemerintah telah melakukan sebuah program, dimana program tersebut diberikan kepada masyarakat. Program tersebut yaitu hutan kemasyarakatan tujuan dari program ini ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana program ini untuk membantu masyarakat meningkatkan hasil produktivitasnya dalam segi perekonomian.

b. Peran penyuluhan Dalam Sosialisasi Program HKm

Peran penyuluhan dalam sosialisasi adalah sangat penting dalam program perhutanan sosial karena sosialisasi merupakan awal dari berjalanya suatu program sehingga masyarakat tahu bahwa pentingnya pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Dari sosialisasi sendiri merupakan suatu pembelajaran bagi seseorang agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya, seperti yang di kemukakan oleh David A. Goslin (T.O Imromi, 1999) dalam Mentari, (2014:41) bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

c. Peran Penyuluhan Dalam Permohonan Izin

Peran penyuluhan dalam permohonan izin merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk pengajuan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan dimana yang sangat dibutuhkan yaitu peran penyuluh untuk membantu masyarakat memudahkan melakukan permohonan izin tersebut.

d. Peran Penyuluhan Dalam Penandaan Batas

Peran penyuluhan adalah suatu kegiatan yang begitu penting bagi masyarakat untuk memahami suatu pekerjaan dalam penandaan batas areal kerja HKm, dimana penyuluh dapat membantu masyarakat dalam mendampingi untuk memudahkan suatu pekerjaan serta memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa batas areal kerja wilayah hutan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk dapat dikelola oleh masyarakat di sekitar hutan demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari, karena dengan adanya peran penyuluh masyarakat mampu memahami.

e. Peran Penyuluhan Dalam Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Peran penyuluhan dalam pengembangan kelembagaan kelompok adalah suatu sikap yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan usahatani mereka didalam pemanfaatan hasil produktivitasnya. pengembangan kelompok merupakan suatu hal penting bagi petani agar kebutuhan mereka terpenuhi dengan adanya kelembagaan kelompok tersebut masyarakat petani akan lebih mudah lagi dalam berkomunikasi dalam artian masyarakat petani akan lebih mudah lagi untuk memecahkan masalahnya dalam bidang usahatania serta hal-hal lain yang menyangkut usahanya.

f. Peran Penyuluhan Dalam Penyusunan Rencana Hutan Kemasyarakatan

Peran penyuluhan dalam penyusunan rencana hutan kemasyarakatan adalah sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat dimana peran penyuluhan ini yaitu sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk menyusun sebuah rencana program hutan kemasyarakatan selain fasilitator penyuluhan juga sebagai pendidik dimana kelompok masyarakat akan diberikan arahan atau pendampingan untuk meningkatkan daya minat masyarakat agar berkeinginan untuk hidup mandiri. Sehingga masyarakat bisa tahu bahwa penyusunan rencana program perhutanan sosial harus butuh penyuluh agar supaya program tersebut terarah dan masyarakat bisa paham tentang hutan kemasyarakatan.

g. Rekapitulasi Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Bondawuna

Berdasarkan penilaian dalam penyuluhan ada enam indikator yang menjadi peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial. Dapat dilihat nilai tertinggi dari sustu peran penyuluhan terhadap program perhutanan sosial yang dilakukan oleh tim penyuluh pada kelompok tani di Desa Bondawuna. Hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Rekapitulasi Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

No	Indikator	Jumlah Skor	Persentase (%)	Kategori
1.	Kondisi Sosial Ekonomi	357	74,38	Baik
2.	Peran Penyuluhan Dalam Sosialisasi Program Hkm	359	74,79	Baik
3.	Peran Penyuluhan Dalam Permohonan Izin	353	73,53	Baik
4.	Peran Penyuluhan Dalam Penandaan Batas	353	73,53	Baik
5.	Peran Penyuluhan Dalam Pengembangan Kelembagaan Kelompok	357	74,37	Baik
6.	Peran Penyuluhan Dalam Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan	357	74,37	Baik
Total		2136	74,16	Baik

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3. Dapat dilihat bahwa hasil rekapitulasi peran penyuluhan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yang terbagi dari enam indikator diantaranya meliputi kondisi sosial ekonomi, peran penyuluhan dalam sosialisasi program HKm, peran penyuluhan dalam permohonan izin,

peran penyuluhan dalam penandaan batas, peran penyuluhan dalam pengembangan kelembagaan kelompok, dan peran penyuluhan dalam rencana kerja hutan kemasyarakatan. dimana total persentase jawabannya sebesar 74,16% dengan memiliki kategori baik. artinya sebagian besar masyarakat memiliki

pandangan baik terhadap program perhutanan sosial khususnya program HKm yang ada di Desa Bondawuna. Dengan adanya peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial, masyarakat bisa memahami dan mengetahui apa yang dimaksud oleh program hutan kemasyarakatan (HKm), Yang pada intinya dengan adanya program perhutanan sosial terlebih khusus program hutan kemasyarakatan (HKm), masyarakat petani dapat meningkatkan hasil produksi mereka dibidang pertanian yang nantinya akan berpengaruh besar didalam kondisi perkonomi petani yang ada di Desa Bondawuna.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program perhutanan sosial yang dapat dilihat dari peran penyuluhan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yang terbagi dari enam indikator diantaranya meliputi kondisi sosial ekonomi, peran penyuluhan dalam sosialisasi program HKm, peran penyuluhan dalam permohonan izin, peran penyuluhan dalam penandaan batas, peran penyuluhan dalam pengembangan kelembagaan kelompok, dan peran penyuluhan dalam rencana kerja hutan kemasyarakatan. dimana total persentase jawabannya sebesar 74,16% dengan memiliki kategori baik. dengan adanya program perhutanan sosial terlebih khusus program hutan kemasyarakatan (HKm), masyarakat petani dapat meningkatkan hasil produksi mereka dibidang pertanian yang nantinya akan berpengaruh besar didalam kondisi perkonomi petani yang ada di Desa Bondawuna. dengan adanya program perhutana sosial ini masyarakat mampu melindungi hutan serta mengelolah dan memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2016 tentang Perhutanan Sosial. Hal ini membuat masyarakat semangat dan menerima adanya program perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasari, R. 2009. *Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) terhadap Kondisi SosialEkonomi Masyarakat di KecamatanKampar Ilir*. Tugas Akhir JurusanPerencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aris Jatmiko, Ronggo Sadono, Lies Rahayu Wijayanti Faida, 2012. Evaluassi kegiatan rehabilitas hutan dan lahan menggunakan analisis multikriteria (studi kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah).
- Abdul Rahman Yunus, 2015. Metode penyuluhan pada petani padi sawah di kecamatan kota timur kota gotontalo
- Ryan Azami, 2018. Presepsi penyuluh kehutanan dan petani terhadap hutan rakyat di kabupaten bogor jawa barat.
- Beyin R. Asiku 2015. Analisis faktor kinerja penyuluh pertanian pada usahatani padi sawah di kecamatan kabila kabupaten bone bolango.
- Badan Pusat Statistik, 2013. Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia.
- Dian Kagungan, 2008. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm)Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
- Iskandar, Hasan Almutahar, M. Sabran, 2013. Kajian Sosiologis Terhadap Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.
- Syahrizal, 2015. Strategi pengembangan hutan kemasyarakatan dengan pola agroforestry di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.